

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 27 PADA
KOPERASI UNIT DESA (KUD) KAMPAR
DI KECAMATAN KAMPAR TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti
Ujian Oral Comprehensive Sarjana Lengkap
Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru*



Oleh:

LISMAR
NIM: 10571001829

**PROGRAM-S1
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2010**

ABSTRAK
ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 27 PADA KOPERASI UNIT DESA
KAMPAR DI KECAMATAN KAMPAR TIMUR

Oleh: Lismar
10571001827

Penelitian ini dilaksanakan di KUD Kampar Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2009. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyajian laporan keuangan Koperasi Unit Desa Kampar, apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tahun 2007.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis tatacara serta penyajian laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa Kampar, kemudian membandingkan dengan PSAK NO. 27 tahun 2007 yang mengatur tentang usaha perkoperasian di Indonesia. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pengurus koperasi dan karyawan koperasi mengenai kegiatan usaha dan sejarah perkembangan koperasi. Dan data sekunder yaitu data yang telah diolah oleh Koperasi Unit Desa Kampar berupa laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan dari laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi yaitu koperasi tidak memisahkan piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non anggota, koperasi tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih, koperasi tidak memisahkan pendapatan yang berasal dari anggota dan pendapatan yang berasal dari non anggota. KUD Kampar hanya menyajikan neraca, perhitungan sisa hasil usaha, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan promosi ekonomi anggota tidak disajikan.

Dari kesimpulan dan saran yang disampaikan penulis, hendaknya koperasi memisahkan antara piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non anggota dan membuat penyisihan piutang tak tertagih, memisahkan antara pendapatan yang berasal dari anggota dan pendapatan yang berasal dari non anggota, koperasi harus menyajikan laporan promosi ekonomi anggota.

Kata Kunci : PSAK No. 27 Tahun 2007, Laporan Keuangan Koperasi

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Gambaran Umum Akuntansi.....	12
B. Gambaran Umum Badan Usaha Koperasi.....	16
C. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi.....	21
D. Penyajian Neraca.....	26
E. Penyajian Laporan Sisa Hasil Usaha.....	39
F. Penyajian Laporan Aru Kas.....	41
G. Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota.....	44
H. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan.....	47
I. Koperasi Menurut Pandangan Islam.....	48

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan.....	50
B. Struktur Organisasi.....	50
C. Aktivitas Usaha Koperasi.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian dan Penyajian Neraca.....	56
B. Penilaian dan Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha.....	63
C. Penilaian dan Penyajian Laporan Arus Kas.....	67
D. Penilaian dan Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota.....	69
E. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan.....	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Laporan keuangan sebagai salah satu system informasi yang sangat dibutuhkan oleh badan usaha yang dalam kegiatan operasionalnya menghasilkan laba, untuk dapat memberikan informasi keuangan dan mempertanggungjawabkan sehubungan dengan kegiatan usaha dalam periode tertentu, yang berguna untuk merencanakan, mengevaluasi, menilai kinerja serta pertanggungjawaban usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti anggota koperasi, kreditur, maupun pemerintah.

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang berdasarkan azas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

Koperasi berdiri atas kerjasama antara sesama anggota untuk mencapai suatu kesejahteraan bersama atas dasar saling percaya. Dilihat dari tujuan koperasi maka pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional, pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi, pembinaan koperasi

pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.

Salah satu sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan adalah laporan keuangan. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, baik bentuk ataupun penyajiannya haruslah berpedoman pada suatu standar yang sesuai dengan keadaan badan usaha tersebut. Untuk laporan keuangan koperasi disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi. Pernyataan ini mencakup mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pada prinsipnya akuntansi koperasi tidak berbeda dengan akuntansi badan usaha lain pada umumnya. Perbedaannya hanya dalam perkiraan-perkiraan tertentu seperti untuk perkiraan modal, yaitu pada koperasi ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan dan hibah, sedangkan dalam bentuk usaha lain perkiraan itu tidak ada. Pada badan usaha lain umumnya disebut “saldo laba” sedangkan pada usaha koperasi disebut dengan perhitungan sisa hasil usaha atau “SHU”. Untuk akun-akun tertentu seperti piutang, kewajiban dan pendapatan harus dibedakan antara transaksi yang terjadi dengan anggota dan non anggota.

Yang mengatur seluruh aturan badan usaha koperasi serta konsep dasar, bentuk dan penyajian laporan keuangan adalah PSAK No. 27. Laporan keuangan koperasi terdiri dari (1) Neraca yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan pada tanggal atau periode tertentu yang ditunjukkan dengan jumlah harta yang dimiliki oleh koperasi atau investasi di dalam koperasi yang disebut dengan Aktiva dan jumlah kewajiban atau sumber-sumber yang digunakan untuk investasi disebut dengan Pasiva. (2) Perhitungan sisa hasil usaha yang menggambarkan kegiatan operasi dan hasil operasi koperasi selama periode tertentu. (3) Laporan arus kas yang menunjukkan arus dana dan perubahan posisi keuangan dalam tahun buku yang bersangkutan. Tujuan utama laporan ini adalah memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. (4) Laporan promosi ekonomi anggota yang memuat gambaran mengenai manfaat koperasi bagi anggotanya. (5) Catatan atas laporan keuangan yang memuat perlakuan akuntansi dan informasi lain yang mendukung kegiatan operasi yang perlu diungkapkan.

Secara umum bentuk penyajian aktiva dan susunannya dalam neraca berdasarkan atas urutan likuiditas yaitu mulai dari aktiva yang cepat dicairkan sampai aktiva yang lambat untuk dicairkan menjadi kas menurut waktunya.

Menurut PSAK No. 27 penyajian aktiva tersebut seperti piutang, biasanya dibagi menjadi dua bagian yaitu piutang kepada anggota dan non anggota. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah perhitungan hasil usaha yang menghasilkan sisa hasil usaha pada anggota dan non anggota.

Aktiva tetap dinilai sebesar harga perolehan aktiva tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Penyajiannya aktiva tetap dimulai dari kadar kekalnya suatu aktiva dimana diawali dengan aktiva yang tahan lama kegunaannya atau wujudnya seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, dan lain-lain. Suatu bentuk penyajian diluar akuntansi keuangan yang biasa adalah penyajian aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutupi kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain.

Sedangkan pada bagian kredit, kewajiban yang timbul karena pembagian SHU diakui sebagai kewajiban lancar dan kewajiban sehubungan dengan dana titipan diperlakukan sebagai kewajiban titipan. Penyajian kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Jika ditinjau dari kekayaan koperasi, maka modal koperasi terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, donasi, cadangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

Untuk penyajian laporan perhitungan hasil usaha, maka menurut bentuk baku dari PSAK No. 27 memuat hasil usaha dengan anggota dan non anggota, yang terdiri dari pendapatan dan beban-beban usaha serta beban perkoperasian selama periode tertentu. Pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima. Pendapatan yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebagai

partisipasi bruto, sedangkan pendapatan yang timbul dari non anggota diakui sebagai penjualan dan dilaporkan terpisah dari partisipasi bruto.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Metode penyajiannya terdiri dari metode langsung dimana penerimaan kas dari penjualan harus benar-benar merupakan kas yang diterima dari pelanggan, metode tidak langsung dimana saldo arus kas sama dengan saldo kas yang terdapat di neraca.

Laporan promosi ekonomi anggota memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota selama satu tahun tertentu. Sedangkan catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan perlakuan akuntansi mengenai harta, kewajiban koperasi, serta pengungkapan informasi lain yang berkaitan dengan pembagian sisa hasil usaha maupun pengurusan.

Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar merupakan koperasi perkebunan kelapa sawit. KUD ini berkedudukan di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Koperasi ini bergerak di bidang usaha unit simpan pinjam, unit angkutan sawit, unit waserda, unit pupuk dan unit listrik.

Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar dalam neraca, penyajian piutang usaha sebesar Rp. 474.439.606.00, didalamnya ada transaksi dengan non anggota sebesar Rp 16.490.000.00. KUD Kampar hanya menyajikan piutang usaha tanpa membedakan piutang usaha antara anggota dan non anggota. Berdasarkan PSAK No.27 penyajian piutang dineraca harus dipisahkan antara piutang anggota dan piutang non anggota.

Dalam penyajian piutang dalam neraca, koperasi hanya mencantumkan nilai piutang brutonya, tanpa menentukann taksiran jumlah yang tak tertagih atas piutang tersebut pada akhir periode, sehingga mempengaruhi kewajaran nilai piutang di neraca. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK yang mengharuskan jumlah bruto tetap piutang disajikan di neraca diikuti dengan penyisihan piutang tak tertagih. Sehubungan dengan piutang tak tertagih keijaksanaan yang diterapkan oleh koperasi adalah metode tidak langsung,

Penyajian perhitungan hasil usaha belum memuat perhitungan tersendiri antara kegiatan usaha dengan anggota dan non anggota. Sehingga pendapatan dari anggota dan non anggota hanya dilaporkan sebagai penjualan. Sedangkan menurut PSAK No.27 pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto, sedangkan pendapatan yang berasal dari non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota. Dengan tidak dipisahkannya pendapatan dari anggota dan non anggota, maka laporan keuangan koperasi tidak dapat mencerminkan tujuan koperasi yang lebih mementingkan transaksi atau pelayanan kepada anggota daripada non anggota.

Adapun SHU dibagikan pada awal tahun, sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam perjanjian kerjasama yang ada, yang terdiri dari:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. SHU, Bagian anggota | : 40% |
| 2. Cadangan | :40% |
| 3. Bagian Pengurus | : 5% |
| 4. Karyawan | : 5% |
| 5. Pendidikan | : 5% |
| 6. Dana Sosial | : 2,5% |
| 7. Pemdaker | : 2,5% |

Dari laporan tahunan KUD Kampar, tidak membuat laporan promosi ekonomi anggota, sehingga tidak dapat diketahui seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh anggota. Sedangkan menurut PSAK No. 27 ayat 56 “Laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan sisa hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan.”

Berdasarkan uraian yang diungkapkan dalam latar belakang masalah diatas maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian pada koperasi Unit Desa (KUD) Kampar dengan judul:

“ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 27 PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) KAMPAR”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Apakah Penerapan Akuntansi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar telah sesuai dengan PSAK No. 27”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi perkoperasian/PSAK No. 27 pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar.

2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi, khususnya akuntansi terhadap perkoperasian.
- b. Bagi koperasi, diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan untuk dijadikan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan PSAK No. 27, bagi KUD Kampar.
- c. Bagi peneliti berikutnya, agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi terhadap penelitian yang akan melakukan pembahasan yang sama masa yang akan datang.

D. Metode Penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar yang berkedudukan di Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok data yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pengurus koperasi dan karyawan koperasi mengenai kegiatan usaha dan sejarah perkembangan koperasi

- b. Data sekunder, yaitu data yang telah diolah koperasi berupa laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, sejarah perusahaan, struktur organisasi dan data lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam membuat skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu pengumpulan informasi dan data melalui dialog langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen koperasi seperti laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi serta dokumen-dokumen lainnya.

4. Analisis data

Dalam menganalisis data informasi yang telah dikumpulkan, digunakan metode deskriptif yaitu penganalisaan terhadap kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang telah penulis dapatkan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan pemecahan masalah yang dihadapi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini berupa bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II : Pada bab ini akan menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai pendukung penulisan kajian ini.
- BAB III : Bab ini berisi tentang gambaran umum koperasi yaitu sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas perusahaan.
- BAB IV : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap laporan keuangan koperasi pada KUD Kampar yang mencakup: metode pencacatan, penyajian neraca, perhitungan hasil usaha, pendapatan dan beban, penyajian arus kas, penyajian laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan.
- BAB V : Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan penulis yang dari penelitian dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pengurus koperasi.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Gambaran Umum Akuntansi.

Akuntansi memegang peranan penting dan dibutuhkan, baik pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bidang usaha. Kebutuhan ini berupa informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Melalui informasi tersebut dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan kinerja suatu entitas ekonomi, sehingga dapat segera diambil tindakan perbaikan.

Berikut ini beberapa definisi akuntansi sebagai berikut:

Akuntansi adalah suatu seni atau keterampilan mengolah transaksi atau kejadian yang setidak-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan dengan cara sedemikian rupa sistematisnya berdasarkan prinsip-prinsip yang diakui umum sehingga para pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan serta hasil operasinya pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan di bidang ekonomi. (Kusnadi, 2002:7)

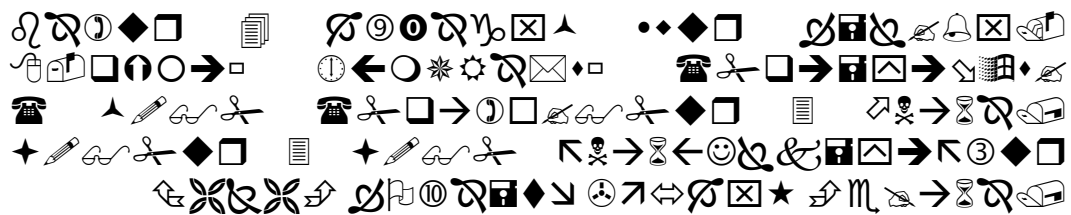
Sedangkan Sofyan Syafri Harahap mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:(2001:3) :

“Akuntansi merupakan bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, hutang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu”

Sedangkan menurut Sadeli adalah: (2006:2):

“Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Termasuk dalam definisi ini adalah keharusan bagian akuntansi untuk mengetahui lingkungan sosial ekonomi di sekitarnya. Tanpa pengetahuan tersebut, mereka tidak akan mengidentifikasi dan membuat informasi yang relevan.”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah^[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi adalah system informasi berupa data kuantitatif yang dibutuhkan sebagai dasar mengambil keputusan baik oleh pihak luar yang mempunyai kepentingan terhadap kesatuan usaha tersebut.

Dilihat dari sisi format pelaporan, maka laporan keuangan koperasi sebagai badan usaha, pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha lain seperti badan usaha swasta dan badan usaha milik Negara. Adapun perbedaan pertama adalah bahwa perhitungan sisa hasil usaha pada koperasi harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan non

anggota. Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota dan non anggota pada perhitungan sisa hasil usaha berdasarkan perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan non anggot.

Perbedaan kedua ialah bahwa laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Dalam hal terjadi penggabungan dua atau lebih kopersi menjadi satu badan hukum koperasi, maka dalam penggabungan tersebut perlu memperhatikan nilai aktiva bersih riil dan bila perlu melakukan penilaian kembali. Dalam hal koperasi mempunyai perusahaan dan unit-unit usaha yang berada dibawah satu pengelolaan, maka disusun laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan.

Menurut Soemarso (2004:3) tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi (*economic information*) dari suatu kesatuan ekonomi (*economic entity*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan kesatuan ekonomi adalah badan usaha (*business enterprise*) informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna bagi pihak-pihak didalam perusahaan itu sendiri maupun pihak luar perusahaan.

Penerapan akuntansi sifatnya tidak mutlak melainkan berubah-ubah. Mungkin saja penerapan antara perusahaan satu berbeda dengan yang lainnya. Namun setiap kesatuan usaha mempunyai kewajiban atau keterkaitan kepada ketentuan yang harus diikuti dalam mengolah transaksi keuangan. Untuk itu setiap laporan yang dihasilkan harus mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Selain itu, perbedaan bentuk badan usaha juga mempengaruhi perbedaan penerapan sistem dan prosedur akuntansi. Badan usaha tersebut diklasifikasikan sebagai berikut : (Hendrojogi 2002: 277)

1. Badan Usaha Perseorangan
2. Badan Usaha Persekutuan
3. Badan Usaha Perseroan
4. Badan Usaha Koperasi.
5. Badan Usaha Milik Negara

B. Gambaran Umum Badan Usaha Koperasi

Dalam tata perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan yang sangat penting sehingga diatur dalam undang-undang. Salah satu landasan operasional dan pedoman bagi koperasi Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah Undang-Undang No.25 tahun 1992.

Pengertian koperasi yang dicantumkan dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 tersebut adalah sebagai berikut:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan” (Pemerintahan RI,1992:2)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia koperasi adalah usaha ekonomi rakyat yang berwatak sosial yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. (PSAK No.27, 2007)

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniyah para anggotanya.(Sutantya Rahardja, 2005,1)

Menuurut Subandi bahwa koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.(2009:15)

Landasan dan asas koperasi umumnya terdiri dari tiga hal sebagai berikut:

(Subandi:21)

1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.
2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafat bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.
3. Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong di antara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal sebagai asas koperasi.

Perbedaan koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya, tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dilakukan. Prinsip pengelolaan organisasi dan usaha koperasi merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi antara lain: (Subandi, 2009: 25)

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal.

5. Kemandirian.

Koperasi sebagai organisasi mempunyai perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan operasionalnya. Menurut ketentuan pasal 21 Undang-Undang No 25 tahun 1992, perangkat koperasi terdiri dari:

1. Rapat anggota
2. Rapat Pengurus Koperasi
3. Badan Pemeriksa

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi yang beranggotakan orang-orang tanpa mewakili aliran, golongan serta paham politik perorangan. Rapat anggota di dalam suatu organisasi termasuk koperasi adalah merupakan sarana dan cara berkomunikasi diantara semua pihak yang berkepentingan didalam tata kehidupan koperasi.

Komunikasi bisa berbentuk tulisan seperti surat-surat keputusan, surat edaran, nota dinas, buletin, dan pengumuman, dan bisa berbentuk lisan seperti pembicaraan berhadap-hadapan, pertelponan, pidato-pidato, konferensi, wawancara, dan rapat-rapat. Demikian juga saluran wewenang dan tanggung jawab, termasuk dalam jenis komunikasi tertulis.

Yang bertanggung jawab menyelenggarakan rapat anggota adalah pengurus koperasi. Rapat anggota pada umumnya diadakan sekali setahun yang disebut Rapat Anggota Tahunan, yang disingkat RAT dimana pengurus memberi

petanggungjawaban atas kebijaksanaan yang telah dilakukan selama setahun buku yang lampau.

Rapat anggota tahunan koperasi membicarakan hal-hal (Ninik Widiyanti, 2004: 22-26) antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian kebijakan pengurus dalam memimpin koperasi selama satu tahun yang lampau
2. Neraca dan perhitungan sisa hasil usaha
3. Penilaian laporan badan pemeriksaan
4. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha koperasi
5. Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun berikutnya
6. Pemilihan pengurus dan badan pemeriksaan (jika masing-masing sudah berakhir masa jabatannya)
7. Masalah-masalah yang timbul dalam rapat (pertanyaan keliling)

2. Pengurus Koperasi

Pengurus ialah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dalam rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Pengurus juga menentukan apakah koperasi itu dapat diterima sebagai rekan usaha yang terpercaya di dalam lingkungan dunia usaha.

Tugas-tugas pengurus adalah: (Subandi, 2009: 56)

1. Mengelola koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rancangan kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
3. Menyelenggarakan rapat anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
5. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus

Pengurus koperasi diberikan wewenang yang mendukung tugas dan tanggungjawab sebagai administrator pelaksanaan kegiatan. Adapun wewenang tersebut:

1. Mewakili koperasi dalam hal koperasi mempunyai masalah, sehingga terlibat dalam urusan hukum di pengadilan
2. Memutuskan kelayakan penerimaan atau penolakan seorang calon sebagai anggota koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi
3. Melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya sebagai pengurus

3. Badan Pengawas

Salah satu perangkat organisasi koperasi adalah pengawas. Tugas pengawas adalah: (Subandi, 2009: 58)

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

Wewenang pengawas koperasi pada dasarnya adalah melakukan penelitian terhadap catatan-catatan yang ada di dalam koperasi, termasuk akuntansi koperasi. Pengawasan mempunyai wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Bila pengawas koperasi memandang perlu menggunakan pihak-pihak independen untuk meminta bantuan akuntan publik, yaitu memeriksa kewajaran laporan keuangan untuk tujuan lain yang memerlukan keterampilan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian itu, maka pengawas berkewajiban melaporkan hasil pengawasannya kepada rapat anggota. Dengan tugas dan wewenang seperti diatas, kiranya cukup jelas bahwa pengawas ialah perangkat organisasi koperasi yang berada di luar lembaga pengurus.

C. Proses Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi

Melaksanakan akuntansi keuangan secara tertib dan teratur serta penyusunan laporan keuangan dari suatu badan usaha dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bahan pertimbangan baik bagi pemilik badan usaha, pihak investor, dan pihak pemberi kredit. Dalam pengambilan keputusan tentang badan usaha yang bersangkutan.

Tujuan laporan keuangan koperasi adalah: (Sitio 2001:107)

1. Menilai pertanggungjawaban pengurus
2. Menilai prestasi pengurus
3. Menilai manfaat yang diberikan koperasi pada anggotanya
4. Menilai kondisi keuangan koperasi

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum dicantumkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI, No.27,2007) sebagai berikut:

Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi:

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas
- d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- e. Arus kas

Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memiliki karakteristik-karakteristik tertentu agar informasi tersebut bermanfaat dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan. Karakteristik-

karakteristik yang harus dimiliki menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, No. 27, 2007) adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar, namun demikian informasi komplis yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan
Informasi harus relevan agar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
3. Materialisasi
Informasi dipandang materialitas kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi mengenai keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*), karenanya materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.
4. Keandalan
Agar bermanfaat informasi juga harus handal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan. Kesalahan material tidak dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar yang diharapkan dapat disajikan.
5. Penyajian jujur
Agar dapat diandalkan informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
6. Substansi mengungguli bentuk
Jika informasi dimasukkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk umumnya.
7. Netralitas
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakaiannya dan tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada

usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan.

8. Pertimbangan sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Seperti tagihan piutang yang diragukan perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam ini diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan.

9. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

10. Dapat dibandingkan

Implikasi penting dan karakteristik kualitatif dapat dibandingkan bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan-kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diperlukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah laporan dari satu periode lain dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan membantu pencapaian daya banding.

Sama halnya dengan badan usaha lainnya, laporan keuangan koperasi harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Namun ada perbedaan tujuan antara laporan keuangan koperasi sebagai organisasi yang tujuan utamanya bukan mencari laba dengan organisasi yang tujuan organisasinya mencari laba. Tujuan laporan keuangan koperasi adalah sebagai berikut: (Sofyan Syafari harahaf, 2001: 40)

1. Laporan keuangan harus dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber-sumber kekayaan.
2. Laporan keuangan berguna untuk menilai jasa dan kemampuan organisasi untuk memberikan jasa.
3. Laporan keuangan berguna untuk menilai bagaimana manajemen meminjam dan menilai investasinya.

4. Laporan keuangan harus dapat memberikan informasi terhadap sumber kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih dan perubahannya.
5. Laporan keuangan harus dapat menyajikan prestasi organisasi.
6. Laporan keuangan harus dapat menyajikan kemampuan organisasi membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.
7. Laporan keuangan harus memuat penjelasan dan penafsiran manajemen.

Beberapa hal yang dapat diinformasikan oleh laporan keuangan koperasi adalah: (PSAK,2007)

1. Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota koperasi
2. Mengetahui prestasi keuangan koperasi selama satu periode
3. Mengetahui transaksi, kejadian, dan kekayaan bersih dalam satu periode. Transaksi yang berkaitan dengan anggota dipisahkan dengan non anggota
4. Informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi

Pada koperasi, pemiliknya adalah anggota koperasi tersebut. Berarti laporan keuangan yang disusun juga adalah untuk kepentingan anggota. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu: (PSAK,2007)

“Pemakai utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri beserta pejabat koperasi”

Oleh karena kegiatan koperasi cenderung ditujukan kepada kepentingan anggota baik sebagai pemilik maupun pelanggan, maka informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan koperasi sedapat mungkin memisahkan antara aktivitas yang dilakukan dengan anggota dan non anggota, hal ini berbeda dengan badan usaha lainnya.

Bagian Laporan Keuangan (Arifin Sitio dan Haloman Tamba,2001:20-23)

1. Neraca (*Balanced Sheet*)
2. Perhitungan sisa hasil usaha (*income statement*)

3. Laporan arus kas (*cash flow*)
4. Catatan atas laporan keuangan
5. Laporan perubahan kekayaan bersih sebagai laporan keuangan tambahan

Sedangkan khusus untuk badan usaha koperasi, dalam standar akuntansi keuangan (IAI, NO.27: Ayat 56) menjelaskan bahwa laporan keuangan koperasi terdiri dari laporan-laporan sebagai berikut:

1. Neraca
2. Perhitungan sisa hasil usaha
3. Laporan arus kas
4. Laporan promosi ekonomi anggota
5. Catatan atas laporan keuangan

D. Penyajian Laporan Neraca

Neraca diartikan sebagai ringkasan keadaan keuangan suatu perusahaan yang terjadi tanggal tertentu, biasanya pada tanggal terakhir suatu tahun, akhir semester, atau laporan akhir bulan

Defenisi neraca menurut Sofyan Syafri Harahap (2006:107)

“Neraca adalah suatau daftar yang menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan modal pemilik perusahaan pada tanggal tertentu.”

Menurut Jumingan (2006:13)

“Neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva, kewajiban dan modal sendiri dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu., biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir triwulan atau akhir tahun.”

Menurut Amin Widjaja (2002:17)

“Neraca adalah suatu gambaran posisi keuangan suatu badan usaha pada saat tertentu lazimnya disajikan dalam bentuk aktiva, utang dan modal.”

Dengan demikian neraca merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai jumlah harta, hutang dan modal perusahaan pada saat tertentu. Angka-angka pada neraca memberikan informasi yang sangat banyak mengenai keputusan yang telah diambil oleh perusahaan. Informasi tersebut dapat bersifat operasional atau strategi, baik kebijakan modal kerja, investasi maupun kebijakan struktur permodalan yang telah diambil oleh perusahaan.

Secara garis besar, neraca memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan dana perusahaan. Sisi sebelah kiri neraca (*Aktiva*) merupakan sisi penggunaan dana perusahaan yakni berupa kebijakan investasi, baik investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek yang dilakukan perusahaan dalam satu periode tertentu. Sedangkan sisi sebelah kanan (*pasiva*) menunjukkan sumber-sumber dana untuk membiayai investasi tersebut baik sumber jangka panjang maupun sumber jangka pendek.

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing pos aktiva dan kewajiban:

a. Aktiva

Aktiva didefinisikan sebagai berikut: (Kieso 2002:55) Aktiva adalah kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh dan dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian yang lalu.

Dari pengertian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu harta merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan atau menghasilkan arus kas masuk pada masa yang akan datang.

Ketentuan mengenai penggunaan aktiva pada koperasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007 ayat 45 dan 47) sebagai berikut:

1. Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutupi kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
2. Aktiva-aktiva yang dikelola koperasi tetapi bukan milik koperasi tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan laporan keuangan.

Koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional sering mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aktiva tetap milik koperasi walaupun aktiva tetap tersebut tidak dapat menutupi kerugian. Dalam hal aktiva tetap tersebut tidak dapat menutupi kerugian sebagaimana yang diisyaratkan oleh penyumbangannya atau telah ditetapkan dalam perjanjian (Akte Penerimaan) sumbangan, maka aktiva tersebut dikelompokkan dalam aktiva lain-lain. Sifat dan pembatasan aktiva tetap harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

b. Aktiva Lancar

Menurut Munawir (2004:14):

“Aktiva Lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukar menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya, (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal).”

Pada umumnya aturan yang dipakai, yang dapat dikelompokkan sebagai harta lancar jika suatu harta dapat diubah menjadi kas atau dapat digunakan untuk membayar kewajiban lancar dalam jangka satu tahun atau satu siklus operasi mana yang lebih panjang waktunya maka harta itu diklasifikasikan sebagai harta yang lancar.

Klasifikasi aktiva lancar ada empat bagian yaitu :

1. Harta Tunai/ Kas Bank
2. Piutang
3. Persediaan (Barang Dagangan)
4. Lain-lain

c. Kas dan Bank

Kas dan Bank adalah uang kas atau surat berharga sejenis kas, baik yang ada dalam koperasi maupun yang ada di bank yang dapat digunakan atau dicairkan seketika sesuai dengan nilainya oleh umum.

d. Piutang

Piutang adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau pelanggan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. (Munawir, 2004:15)

Menurut Fraser piutang adalah saldo penjualan secara kredit yang belum dibayar pelanggan dan dilaporkan di neraca pada nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah yang aktual akun dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. (Fraser 2008:71)

Dalam menilai jumlah piutang dinyatakan sebesar jumlah bruto tagihan dikurangi dengan taksiran piutang tak tertagih. Dalam hal tersebut dapat diketahui bahwa untuk laporan piutang dalam neraca adalah sebesar jumlah yang akan direalisasikan yaitu jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

Kapan piutang usaha menjadi tak tertagih? Tidak ada satu pun ketentuan umum yang dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu piutang menjadi tak tertagih. Kenyataanya, bahwa seorang debitur gagal untuk membayar piutang sesuai kontraknya pada saat jatuh tempo tidak berarti bahwa piutang tersebut tidak akan dapat ditagih. Bangkrutnya debitur adalah salah satu petunjuk yang paling signifikan mengenai tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang. Petunjuk lainnya meliputi penutupan bisnis pelanggan atau gagalnya upaya penagihan setelah dilakukan beberapa kali usaha.

Terdapat dua metode akuntansi untuk mencatat piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih yaitu:

1. Metode penyisihan membuat akun beban piutang tak tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapus.
2. Metode penghapusan langsung mengakui beban hanya pada saat piutang dianggap benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

e. Persediaan

Persediaan adalah barang yang dipegang untuk dijual atau digunakan dalam produksi produk yang akan dijual. (Fraser,2008:73)

Persediaan barang dagang dalam badan usaha koperasi yaitu barang-barang yang dimiliki koperasi atau belum dijual pada suatu saat tertentu, dengan maksud untuk dijual kembali dengan siklus operasional normal perusahaan (dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun).

f. Investasi

Investasi atau penyertaan yaitu penanaman modal diluar koperasi baik itu berupa investasi pada koperasi lainnya maupun investasi pada badan usaha bukan koperasi. Investasi pada koperasi lainnya dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Investasi jangka pendek, dengan karakteristik:
 - a. Pencairan tidak dibatasi, umumnya relatif pendek
 - b. Tidak dapat diperjualbelikan.
 - c. Dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan
- 2) Investasi jangka panjang, dengan karakteristik:
 - a. Permanen (jangka waktu tidak dibatasi)
 - b. Umurnya tergantung pada ketentuan yang berlaku pada koperasi dan relatif jangka panjang
 - c. Tidak dapat diperjualbelikan

- d. Lebih dititikberatkan sebagai ikatan dalam system jaringan koperasi

Berikut ini ketentuan mengenai investasi atau modal penyertaan yang dimuat dalam standar akuntansi keuangan (IAI, No. 27 tahun 2007) sebagai berikut:

1. Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah modal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang sudah diterima selain uang tunai maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.
2. Modal penyertaan ikut menutupi resiko pembelian kerugian dan memiliki sifat relative permanent, dan imbalan atas permodalan didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu modal penyertaan tersebut diakui sebagai ekuitas.
3. Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka penyajian investasi di neraca dinilai sebesar harga perolehan (*cost*) dan investasi modal penyertaan tersebut.

g. Aktiva Tetap

Menurut Kieso (2002:193) Aktiva Tetap adalah :

“Manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa depan, atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.”

Selanjutnya diuraikan mengenai pos-pos aktiva tetap sebagai berikut :

1. Alat angkut / Kendaraan
2. Peralatan Kantor
3. Bangunan
4. Tanah

Aktiva tetap dinilai sebesar harga perolehan aktiva dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aktiva tetap merupakan suatu alokasi harga perolehan aktiva tetap periode akuntansi. Digunakan dengan memilih metode yang cocok sesuai dengan kondisi aktiva tetap yang dimiliki.

h. Aktiva Lain-lain

Pada perkiraan ini dimaksudkan semua pos-pos yang tidak dapat dimasukkan pada pos lainnya. Termasuk juga unsur dari aktiva ini adalah aktiva tetap dalam konstruksi dan beban yang ditanggungkan

i. Aktiva Titipan

Aktiva titipan adalah aktiva milik pihak lain yang dikuasakan penggunaannya kepada koperasi. Aktiva-aktiva yang diberikan oleh pemerintah maupun badan-badan lain untuk dioperasikan atau diusahakan oleh koperasi, akan tetapi kepemilikan aktiva tersebut berada pada pihak yang memberikan bantuan.

Aktiva tersebut berbentuk pemberian pinjaman lunak, hibah (aktiva tetap dan modal kerja) dan bantuan pemberian hak untuk mengoperasikan atau mengusahakan sejumlah aktiva tertentu, yang pada umumnya adalah aktiva tetap produksi seperti traktor, mesin foto copi, kendaraan dan sebagainya.

Aktiva titipan dicatat dan diakui sebagai aktiva koperasi karena koperasi mempunyai hak menguasai dan mengusahakan atau mengoperasikan aktiva tetap titipan tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa.

Akibat dicatat atau diakuinya aktiva titipan tersebut sebagai aktiva, maka total atau kekayaan koperasi menjadi naik atau berlebihan, sedangkan aktiva titipan tersebut bukan milik koperasi. Untuk mengatasi agar penyajian aktiva tidak berlebihan, maka untuk keperluan penyajian aktiva titipan harus diimbangi dengan pengakuan dengan timbulnya kewajiban titipan. Kewajiban titipan disajikan sebagai rekening kontra dari aktiva titipan agar total aktiva tidak dilaporkan secara berlebihan.

j. Harta Tak Berwujud

Merupakan aktiva perusahaan yang mencerminkan hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam operasi perusahaannya. Sebagai contoh hak paten, hak cipta, goodwill. Cara penyajiannya dicatat sebesar harga perolehan. Dalam amortisasi aktiva dilakukan secara sistematis selama masa manfaat.

k. Kewajiban (*Liabilitas*)

Kewajiban pada badan usaha koperasi merupakan kewajiban kepada pihak luar bukan pemilik yang timbul akibat transaksi perolehan sumber daya ekonomi yang dilakukan sehingga mengakibatkan arus kas keluar dimasa yang akan datang

l. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek pada badan usaha koperasi terdiri dari (IAI, No. 27, 2007, ayat 15)

1. Hutang Usaha
2. Hutang Bank
3. Hutang Pajak
4. Hutang simpanan anggota
5. Hutang Dana bagian SHU
6. Hutang jangka panjang akan jatuh tempo

7. Biaya yang harus dibayar

m. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang pelunasannya dalam waktu lebih dari satu tahun, dan kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo tahun yang akan datang dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Kewajiban dapat timbul karena pembelian barang dan jasa kepada anggota dan bukan anggota pada koperasi lain. Pembagian Sisa Hasil Usaha dan kewajiban kepada koperasi lain untuk menanggung kerugian koperasi lain.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, No. 27 tahun 2007)

Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup resiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman yang diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Kadang kala sumbangan yang diterima oleh koperasi dengan persyaratan tertentu yang mengikat sehingga hakikat sumbangan tersebut adalah pinjaman. Sumbangan ini tidak dapat diakui sebagai ekuitas, tetapi harus diakui sebagai kewajiban lain-lain jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan laporan keuangan.

n. Ekuitas

Kekayaan bersih koperasi merupakan jumlah nilai kekayaan pemilik yang ditanamkan dalam sumber-sumber daya ekonomi koperasi atau selisih antara harta dan kewajiban.

Ekuitas koperasi terdiri dari (IAI, No. 27 tahun 2007):

1. Modal anggota berbentuk simpanan pokok
2. Modal anggota berbentuk simpanan wajib
3. Modal anggota berbentuk simpanan-simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib
4. Modal penyertaan

5. Modal sumbangan
6. Cadangan
7. Sisa hasil usaha yang belum dibagikan

Beberapa karakteristik dalam penyajian koperasi yang diatur oleh standar akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Modal Anggota

- a) Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominal.(IAI,No.27,Ayat 19 tahun 2007)
- b) Simpanan pokok dan simpanan wajib, yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.(IAI.No.27 Ayat 24 tahun 2007)
- c) Kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota baru dan diakui diatas nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penysetoran partisipasi anggota. (IAI,No.27 Ayat 27 tahun 2007)

2. Modal Penyertaan

- a) Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.(IAI,NO27 Ayat 29 tahun2007)
- b) Ketentuan mengenai perjanjian dan permodalan yang menyangkut pembagian keuntungan atau hasil usaha, tanggungan kerugian, jangka waktu, dan hak-hak permodalan harus dijelaskan dalam catatan atau laporan keuangan.(IAI,No27 Ayat 32 tahun 2007)

3 Modal Sumbangan.

Modal sumbangan yang diterima koperasi yang dapat menutup resiko kerugian disebut ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.(IAI,No 27 ayat 33 tahun 2007

4.Cadangan

- a) Cadangan dan tujuan penggunaannya dijelaskan dalam catatan atau laporan keuangan.(IAI,No27 Ayat 36 tahun2007)
- b) Pembayaran tambahan pada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi diatas jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain dibebankan kepada cadangan.(IAI,No.27 Ayat 38 tahun 2007)

5. Sisa Hasil Usaha belum dibagi

Sisa hasil usaha belum dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis jumlah dan pembagian SHU telah diatur secara jelas maka pembagian yang tidak menjadi hak

koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka SHU tersebut dicatat sebagai SHU belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.(IAI,No.27 Ayat 40 tahun 2007)

Secara formal, anggota dapat diakui sebagai anggota koperasi jika ia telah menyetor uang sejumlah tertentu sebagai simpanan pokok saat pertama menjadi anggota. Disamping itu ia juga harus menyetor sejumlah uang tertentu secara berkala sebagai simpanan wajib. Simpanan pokok dan simpanan wajib ini berfungsi untuk menutupi resiko dan karena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan contoh neraca yang disusun pedoman pada PSAK NO. 27 yang dapat dilihat pada Tabel II.1

Tabel II.1
KOPERASI XXX
NERACA
31 Desember 20X1 dan 20X0

AKTIVA	20X1	20X0	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20X1	20X0
AKTIVA LANCAR			KEWAJIBAN JANGKA		
Kas dan Bank	Rp XXXX	Rp XXXX	PENDEK		
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX	Hutang Usaha	Rp XXXX	Rp XXXX
Piutang Usaha	XXXX	XXXX	Hutang Bank	XXXX	XXXX
Piutang Pinjaman Anggota	XXXX	XXXX	Hutang Pajak	XXXX	XXXX
Piutang Pinjaman Non Anggota	XXXX	XXXX	Hutang Simpanan Anggota	XXXX	
Piutang Lain-lain	XXXX	XXXX	XXXX.		
Peny. Piutang tidak Tertagih	XXXX	XXXX	Hutang Dana Bagian SHU	XXXX	XXXX
Persediaan	XXXX	XXXX	Hutang Jangka Panjang		
Pendapatan akan Diterima	XXXX	XXXX	Akan Jatuh Tempo	XXXX	XXXX
Jumlah Aktiva Lancar	<u>Rp XXXX</u>	<u>Rp XXXX</u>	Biaya Harus Dibayar	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
			Jumlah Kewajiban		
INVESTASI JANGKA PANJANG			Jangka Pendek	<u>Rp XXXX</u>	<u>Rp XXXX</u>
Penyertaan Pada koperasi	Rp XXXX	Rp XXXX	KEWAJIBAN JANGKA		
Penyertaan Pada NnKop.	XXXX	XXXX	PANJANG		
Jumlah Investasi jangka Panjang	<u>Rp XXXX</u>	<u>Rp XXXX</u>	Hutang Bank	Rp XXXX	Rp XXXX
			Hutang Jangka Panjang Lainnya	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
AKTIVA TETAP			Jumlah Kewajiban		
Tanah/Hak atas Tanah	Rp XXXX	Rp XXXX	Jangka Panjang	<u>Rp XXXX</u>	<u>Rp XXXX</u>
Bangunan	XXXX		EKUITAS		
	XXXX		Simpanan Wajib	Rp XXXX	Rp XXXX
Mesin	XXXX		Simpanan Poko	XXXX	XXXX
	XXXX		Modal Penyertaan		
Inventaris	XXXX		Partisipasi Anggota	XXXX	XXXX
	XXXX		Modal Penyertaan	XXXX	XXXX
Akumulasi Penyusutan	XXXX	XXXX	Modal Sumbangan	XXXX	XXXX
Jumlah Aktiva Tetap	<u>Rp XXXX</u>	<u>Rp XXXX</u>	Cadangan	XXXX	XXXX
			SHU Belum Dibagi	XXXX	XXXX
AKTIVA LAIN-LAIN			Jumlah Ekuitas	<u>Rp XXXX</u>	<u>RP XXXX</u>
Ak. Tetap dalam Kontruksi	Rp XXXX	Rp XXXX	JUMLAH KEWAJIBAN		
Beban Ditangguhkan	XXXX	XXXX	DAN EKUITAS	<u>Rp XXXX</u>	<u>Rp XXXX</u>
Jumlah Aktiva Lain-lain	<u>Rp XXXX</u>	<u>Rp XXXX</u>			
JUMLAH AKTIVA	<u>Rp XXXX</u>	<u>Rp XXXX</u>			

Sumber: PSAKNo.27

E. Penyajian Laporan Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi netto dan laba atau rugi dengan anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain seta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.

Perhitungan hasil usaha bertujuan untuk menentukan sisa hasil usaha yang diperoleh selama satu tahun periode dengan membandingkan antara pendapatan dan beban yang dikeluarkan selama satu periode. Menurut UU No.25 tahun 1992 sisa hasil usaha adalah:

Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku bersangkutan. (Pemerintahan RI, UU No.25 tahun 1992)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, perhitungan hasil usaha memuat pos-pos pendapatan dan beban yang terjadi dalam satu periode. (IAI, No.27 Ayat 49,51 dan 54 tahun 2007)

1. Pendapatan koperasi yang timbul dan transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto
2. Pendapatan koperasi yang berasal dan transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dan partisipasi anggota dalam laporan perhitungan usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.
3. Beban usaha dan beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Karakteristik mengenai penyajian laporan ini (IAI, No.27, Ayat 40 dan 58 tahun 2007) diatur sebagai berikut:

1. Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi
2. Dalam jenis dan jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban

3. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha yang belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan laporan keuangan

Beban koperasi adalah beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, antara lain adalah beban pelatihan anggota, beban pengembangan usaha anggota, dan beban iuran untuk gerakan koperasi.

Beban operasional koperasi dapat dikelompokkan dalam dua bagian seperti yang dikemukakan oleh Arifin Sitio dan Haloman Tamba (2001:34-35):

1. Beban pemasaran
Yang tercakup dalam beban pemasaran seperti: beban bahan pengemasan, beban angkut, dan lain sebagainya.
2. Beban administrasi dan Umum
Yang tercakup dalam beban administrasi dan umum seperti: beban gaji karyawan, beban sewa gedung dan bangunan, beban administrasi dan beban penyusutan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan contoh laporan perhitungan sisa hasil usaha yang disusun berpedoman pada PSAK No. 27 yang dilihat dari table II.2

Table II.2
KOPERASI XXX
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Tahun Yang Berjalan pada Tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0

	20X1	
20X0		
PARTISIPASI ANGGOTA		
Partisipasi Bruto Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
Beban Pokok(<u>(xxxx)</u>	
	(xxxx)	
Partisipasi Neto Anggota	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>

PENDAPATAN DARI NON ANGGOTA

Penjualan	Rp xxxx	Rp xxxx
Harga Pokok	<u>(xxxx)</u>	
	(xxxx)	
Laba (Rugi) Kotor dengan Non-Anggota	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Sisa Hasil Usaha Kotor	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>

BEBAN OPERASI

Beban Usaha Koperasi	<u>(xxxx)</u>	(xxxx)
Sisa hasil Usaha Koperasi	Rp xxxx	Rp xxxx
Beban perkoperasian	<u>(xxxx)</u>	
		(xxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian	Rp xxxx	Rp xxxx
Pendapatan dan Beban Lain-lain	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-pos Luar Biasa	Rp xxxx	Rp xxxx
Pendapatan dan Beban Luar Biasa	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Paajak	Rp xxxx	Rp xxxx
Pajak Penghasilan	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Sisa hasil usaha setelah pajak	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>

Sumber: PSAK No. 27**F.Penyajian Laporan Arus Kas**

Arus kas diklasifikasikan berdasarkan arus kas menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

Jumlah arus kas yang berasal dari kas yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan perusahaan, membayar deviden dan melakukan investas baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar.

Sedangkan dalam pelaporan arus kas dan aktivitas investasi dan pendanaan, perusahaan harus melaporkan secara terpisah kelompok utama dan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas operasi dan pendapatan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan contoh laporan arus kas yang disusun berpedoman pada PSAK No. 27 yang dilihat dari tabel II.3

Tabel II.3 KOPERASI XXX LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 20XX			
			Rp
ARUS KAS BERASAL DARI KEGIATAN OPERASI:			
SHU Bersih			xxxx
Penyesuaian:			
Beban Penyusutan		xxxx	
Beban Amortisasi		xxxx	
Penurunan hutang Kendaraan		(xxxx)	
Kenaikan Hutang Titipan		xxxx	

Kenaikan Hutang lain-lain	xxxx	
Kenaikan Biaya YMH Dibayar	xxxx	
Kenaikan SHU Bagian Anggota	xxxx	
Kenaikan Hutang Dana-dana	xxxx	
Kenaikan Piutang Usaha	(xxxx)	
Penurunan Piutang Lain-lain	xxxx	
Kenaikan Persediaan	(xxxx)	
		<u>xxxx</u>
Kas bersih yang berasal dari kegiatan operasi		xxxx

ARUS KAS BERASAL DARI KEGIATAN INVESTASI

Penambahan Tanah		
Penambahan Bangunan	(xxxx)	
Penambahan Kendaraan	(xxxx)	
Penambahan Peralatan Kantor	(xxxx)	
Kas bersih yang berasal dari kegiatan investasi		<u>(xxxx)</u>

ARUS KAS BERASAL DARI KEGIATAN PENDANAAN

Penurunan Hutang JK Panjang	(xxxx)	
Kenaikan Simpanan Pokok	xxxx	
Kenaikan Simpanan Wajib	xxxx	
Cadangan	xxxx	
Pencairan SHU Tahun lalu	(xxxx)	
Kas bersih yang berasal dari kegiatan pendanaan		<u>(xxxx)</u>
Kenaikan Kas		xxxx
Kas 1 Januari 2008		xxxx
Kas 31 Desember 2008		xxxx

Sumber: PSAK No. 27

G. Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.

Laporan tersebut mencakup empat unsur (IAI, No. 27 Ayat 62 tahun 2007):

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang dan pengadaan barang bersama
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha

Karakteristik pelaporan laporan promosi ekonomi anggota adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal SHU tahun berjalan yang belum dibagi, manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian SHU pada akhir tahun buku dapat dicatat sebagai taksiran jumlah SHU yang akan dibagi untuk anggota
- b. Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dan transaksi pelayanan yang digunakan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan.
- c. Pembagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku.
- d. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi usaha yang dijalankan.
- e. Dalam pembagian SHU tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian SHU dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan contoh laporan promosi ekonomi anggota yang disusun Berdasarkan PSAK No.27 yang dapat dilihat pada Tabel II.4.

TABEL II.4
KOPERASI XXX
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0

	20X1	20X0
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN		
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA		
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar		
Harga Koperasi	Rp xxxx	Rp xxxx
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar		
Harga Pasar	<u> (xxxx) </u>	<u> (xxxx) </u>
Jumlah promosi Ekonomi dari transaksi		
Pemasaran produk Anggota	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI PENBGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA		
Pengadaan Barang atas Dasar harga Pasar	Rp xxxx	Rp xxxx

Pengadaan Barang atas Dasar Harga Koperasi	____(xxxx)	____(xxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi		
Pengadaan Barang untuk Anggota	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI:		
Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	____(xxxx)	____(xxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penediaan		
Jasa Untuk Anggota	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama		
Tahun Berjalan	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
PROMOSI EKONOMI ANGGOTA AKHIR TAHUN	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Pembagian SHU Tahun Berjalan untuk Anggota		
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>

Sumber: PSAK No.27

H. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan harus dibaca agar memahami penyajian setiap laporan keuangan.

Menurut IAI (2004:27.13-27.14) Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat :

1. Perlakuan akuntansi mengenai
 - a. Pengungkapan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
 - b. Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.
 - c. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.
2. Pengungkapan informasi antara lain :

- a. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) maupun dalam praktek atau yang telah dicapai oleh koperasi.
- b. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru bagi anggota.
- c. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi anggota dan non anggota.
- d. Pengklasifikasian hutang dan piutang yang timbul dari transaksi anggota dan non anggota.
- e. Pembatasan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
- f. Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi
- g. Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta
- h. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan penggunaan cadangan.
- i. Hak dan tanggungan pemodal modal penyerta
- j. Penyelenggaraan rapat anggota dan keputusan-keputusan yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan menjelaskan yang berkaitan dengan laporan keuangan juga mengenai kebijakan koperasi atas metode-metode yang digunakan, perolehan aktiva, pembagian sisa hasil usaha, dan lain sebagainya. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan tersebut, maka akan mempermudah para pengguna laporan keuangan tersebut untuk memperoleh informasi-informasi mengenai laporan keuangan dari kebijakan yang dibuat oleh koperasi tersebut.

I. Koperasi Menurut Pandangan Islam

Sebagian ulama menganggap koperasi atau disebut juga dengan *syirkah ta'awuniyah* sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut

perjanjian, dan di antara syarat sah mudharabah itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap.

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab syirkah ta'awuniah tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh fukaha. Sebab syirkah ta'awuniah, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan system penggajian yang berlaku.

Mengenai status hukum berkoperasi bagi umat Islam juga didasarkan pada kenyataan, bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dibangun oleh pemikiran barat, terlepas dari ajaran dan kultur Islam. Artinya, bahwa Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan, dan tidak pula dilakukan orang pada zaman Nabi.

Dengan berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan koperasi tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, sebab pengelolaannya bersifat demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota. Karenanya koperasi tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan dapat dibenarkan bahkan sangat dianjurkan, sesuai dengan makna ayat yang tercantum dalam Al-Qur'an yaitu:



Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi Unit Desa Kampar adalah sebuah koperasi yang didirikan oleh warga atau masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama dibidang pertanian. Selain itu, koperasi ini juga mengelolah beberapa unit usaha untuk lebih meningkatkan pelayanannya terhadap anggota, seperti unit simpan pinjam, unit listrik dan unit kendaraan. Unit kendaraan ini digunakan oleh koperasi untuk mengangkut hasil pertanian serta perkebunan yang dimiliki oleh anggota.

KUD Kampar bekedudukan di Desa Kampar Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Timur Propinsi Riau. KUD Kampar didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Riau dengan Badan Hukum No. 752-a/BH/XIII/1982.

B. Struktur Organisasi

Didalam suatu organisasi, struktur organisasi merupakan garis wewenang dan tanggungjawab serta hubungan antara atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Dari struktur organisasi tersebut dapat terlihat pembagian dan pendistribusian tugas untuk setiap orang yang ada didalamnya secara jelas dan tegas.

Struktur organisasi koperasi disusun berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian yang menyatakan bahwa alat kelengkapan koperasi terdiri dari:

- a. Rapat anggota, merupakan badan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi
- b. Pengurus, merupakan badan yang menjalankan keputusan rapat anggota
- c. Badan pemeriksa/pengawas, merupakan badan yang mengawasi jalannya kegiatan koperasi

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Koperasi Unit Desa Kampar dan bagian-bagian yang ada didalamnya dapat dilihat pada gambar III.1 berikut ini:

Berdasarkan struktur tersebut, maka tugas-tugas dari masing-masing bagian antara lain sebagai berikut:

1. Rapat Anggota Tahunan

Sesuai dengan Dirjen Koperasi, maka Rapat Anggota Tahunan atau RAT merupakan kekuasaan tertinggi. Dalam RAT ditetapkan segala keputusan penting yang menyangkut organisasi dan kelangsungan koperasi. Adapun fungsi dari RAT adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan atau menyenggarakan RAT
- b. Merumuskan kebijakan koperasi
- c. Mengesahkan hasil laporan keuangan koperasi.
- d. Menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja, anggaran dasar serta program kerja koperasi

2. Pengurus

Pengurus dipilih oleh koperasi dalam RAT. Pengurus merupakan pengelola dari organisasi yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- d. Melaksanakan tindakan dan upaya bagi kepentingan koperasi dan memantau koperasi sesuai dengan tanggungjawab dan keputusan rapat anggota.

Pengurus merupakan wakil anggota terpilih dalam RAT yang diberi wewenang untuk menjalankan usaha-usaha koperasi tersebut. Adapun susunan pengurus itu terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Manajer

3. Badan Pengawas

Merupakan kelengkapan koperasi yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan koperasi yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengurus koperasi, para anggota dan tebusannya disampaikan kepada pejabat atau Dirjen Koperasi.

C. Aktivitas Usaha Koperasi

KUD Kampar berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, dalam rangka menggalang persatuan serta terlaksananya pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka koperasi ini menyelenggarakan usaha-usaha yang dikelompokkan dalam beberapa unit usaha yaitu:

- a. Unit usaha simpan pinjam

Usaha simpan pinjam dilakukan untuk mempermudah anggota apabila ada kebutuhan mendesak maka KUD KAMPAR berusaha mencari jalan keluarnya dengan meminjamkan uang sesuai dengan keadaan keuangan yang ada.

b. Unit usaha kendaraan

Unit usaha kendaraan ini bertujuan agar mempermudah anggota untuk melakukan pengangkutan buah sawit ,sehingga produksi sawit petani (anggota) terangkut sampai ketujuan dengan waktu yang telah ditentukan.

c. Unit usaha listrik

Unit usaha ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran rekening listrik, karena kantor PLN jauh dari Kampar yaitu di daerah Bangkinang.

d. Unit usaha pupuk

Unit usaha ini bertujuan agar anggota mempermudah anggota dalam memperoleh pupuk.

e. Unit usaha pemasaran

Usaha usaha pemasaran ini bertujuan mempermudah anggota memasarkan hasil sawitnya. Koperasi Unit Desa Kampar melakukan suatu kerja sama dengan PT. TASMAPUJA.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari uraian telaah pustaka yang disajikan pada bagian sebelumnya, dapat digunakan sebagai pedoman dalam membahas laporan keuangan koperasi. Pada bab ini penulis mencoba memberikan analisis dan penelitian terhadap PSAK No. 27 pada KUD Kampar.

A. Penilaian dan Penyajian Neraca

Neraca KUD Kampar disajikan secara komperatif antara tahun buku 2007 dan 2008 dan disusun dalam bentuk skronto atau T Accaunt dimana semua pos aktiva disajikan di sebelah kiri dan pos kewajiban dan modal disajikan di sebelah kanan. Bentuk ini telah sesuai dengan PSAK dan penyajian secara komperatif dapat lebih membantu para pemakai laporan keuangan untuk melihat perkembangan koperasi.

1. Kas

Kas sebesar Rp. 235.542.739,92 merupakan saldo kas Per 31 Desember 2008. Kas dalam neraca merupakan milik koperasi yang digunakan sewaktu-waktu untuk aktivitas koperasi pada saat koperasi membutuhkan, karena kas tersebut milik koperasi itu sendiri, bukan merupakan aktiva titipan dari koperasi lainnya. Sesuai dengan sifat kas yang paling likuid, maka kas disajikan pada urutan paling atas dari aktiva lancar. Hal ini telah sesuai dengan format yang ada pada PSAK No. 27.

2. Piutang

Piutang yang dilaporkan di neraca berasal dari penjualan barang dagangan dan usaha berupa jasa kepada anggota dan non anggota. Penialain piutang yang dicantumkan di neraca berdasarkan jumlah tagihan yang berasal dari penjualan barang dagang dan jasa. Berdasarkan data yang ada, maka dapat dilihat bahwa terdapat dua permasalahan dalam penilaian dan penyajian pada neraca KUD Kampar, sehingga belum sesuai dengan PSAK No. 27.

Menurut PSAK No. 27 tahun 2007, penyajian piutang di neraca harus dipisahkan antara piutang usaha, piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non anggota. Dari hasil wawancara dan dari daftar lampiran laporan pertanggungjawaban pengurus, diperoleh informasi bahwa pada beberapa piutang unit simpan pinjam terdapat persentase piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non anggota, diantaranya yaitu:

1. Piutang pinjaman anggota Rp 440.738.606
2. Piutang pinjaman non anggota Rp 27.461.000

Tidak adanya pemisahan piutang pinjaman kepada anggota dan piutang pinjaman kepada non anggota ini menyebabkan laporan keuangan tidak dapat memberikan informasi seberapa besar manfaat yang diberikan kepada anggota koperasi serta tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan keterkaitan antara anggota dengan koperasi.

Penyajian piutang hanya disajikan sebesar nilai bruto, karena pengurus koperasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang dapat ditagih. Koperasi

menggunakan metode penghapusan langsung. Oleh karena itu koperasi tidak melakukan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut, sehingga dalam laporan neraca tidak terdapat perkiraan penyisihan piutang tak tertagih dan dalam laporan perhitungan sisa hasil usaha tidak terdapat perkiraan beban piutang ragu-ragu. Maka hal ini tidak sesuai dengan format yang ada dalam PSAK No. 27.

Menurut PSAK sebaiknya KUD Kampar menggunakan metode penyisihan dalam menilai piutang yang disajikan dalam neraca, karena jumlah dari sebagian piutang yang tak tertagih tersebut akan material dan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan maupun dalam pengambilan keputusan bagi pengurus atau pemakai laporan keuangan koperasi dalam menilai total aktiva.

Untuk lebih jelas dalam hal menempatkan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh tidak tertagihnya piutang dari pelanggan dengan metode analisis umur piutang. Berikut ini akan diberikan sebuah contoh mengenai bagaimana cara membuat daftar piutang dan bagaimana menetapkan jumlah penyisihan piutang tak tertagih serta bagaimana cara pencatatannya.

Tabel. IV.1
TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH KUD KAMPAR

Kelompok Umur	Jumlah (Rp)	Persentase Piutang Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Belum Jatuh Tempo	457.084.606	1 %	4.570.846,06
Lewat Jatuh Tempo 1-30 hari	600.000	3 %	18.000,00
Lewat Jatuh Tempo 31-90 hari	2.597.000	5 %	129.850,00
Lewat Jatuh Tempo 91-180 hari	6.050.000	10 %	605.000,00
Lewat Jatuh Tempo 181-hari	1.868.000	20 %	373.600,00
Jumlah	468.199.606		5.697.296,06

Jurnal yang seharusnya dibuat oleh koperasi adalah:

Beban Piutang Tak Tertagih Rp 5.697.296,06

Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.

5.697.296,06 Agar didapat suatu gambaran yang jelas, maka contoh penyajian piutang di dalam neraca dapat dilihat di bawah ini:

**NERACA
KUD KAMPAR
Per 31 Desember 2008**

Aktiva

Aktiva Lancar

Kas

Piutang usaha Rp. 6.240.000,00

Piutang pinjaman anggota Rp. 440.738.606,00

Piutang pinjaman non anggota Rp. 27.461.000,00

Piutang lain-lain Rp. 2.000.000,00

Penyisihan piutang tak tertagih (5.697.296,06)

Piutang dagang (netto) Rp 470.742.309,94

Sumber : Data Olahan

3. Persediaan

Penilaian persediaan KUD Kampar sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Persediaan terdiri dari persediaan waserda dan persediaan pupuk. Seluruh persediaan barang dagangan dinilai berdasarkan harga beli faktur pembelian dalam periode tahun buku yang bersangkutan. Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah FIFO yaitu pertama masuk harga barang pertama keluar.

4. Aktiva Tetap

Aktiva tetap yang terdapat pada KUD Kampar terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, peralatan usaha, peralatan kantor. Perlakuan akuntansi

terhadap aktiva tetap ini telah sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Karena aktiva tetap diukur dan diakui berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus, sehingga dalam neraca terdapat perkiraan akumulasi penyusutan dan dalam laporan perhitungan sisa hasil usaha terdapat perkiraan beban penyusutan. Penyajian aktiva tetap di neraca terdiri atas:

1. Tanah	Rp 11.500.000,00
2. Bangunan	Rp 52.812.000,00
3. Kendaraan	Rp 507.200.000,00
4. Peralatan Usaha	Rp 1.771.000,00
5. Peralatan Kantor	Rp 26.409.167,00
Ak. Peny. Aktiva Tetap `	Rp. <u>(218.666.848,33)</u>
Jumlah aktiva tetap	Rp. 381.025.318,67

5. Permodalan Koperasi

Pada neraca KUD Kampar sumber-sumber permodalan digolongkan menjadi dua kelompok yaitu kewajiban dan ekuitas.

1. Kewajiban

Kewajiban pada koperasi ini terdiri dari dua yaitu kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar terdiri dari:

a. Hutang Usaha	Rp. 13.340.000,00
b. Hutang Titipan	Rp. 187.913.415,31
c. Hutang Lain-lain	Rp 233.293.000,00

- d. Biaya YMH Dibayar Rp. 17.760.100,00
- e. SHU Bagian Anggota Rp. 91.926.749,65
- f. Hutang Dana-dana Rp. 26.891.101,97

Sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan hutang koperasi pada BPD sebesar Rp. 50.000.000, dan pada Dinas Koperasi sebesar Rp. 50.000.000.

2. Ekuitas

Ekuitas pada KUD Kampar merupakan kekayaan bersih koperasi yang terdiri dari:

- a. Simpanan Pokok Rp. 40.007.000,00
- b. Simpanan Wajib Rp. 39.675.490,00
- c. Donasi Rp. 38.000.000,00
- d. Cadangan Rp. 101.189.921,45
- e. SHU Tahun Berjalan Rp. 218.855.386,21

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas disajikan penyajian neraca yang disusun berpedoman pada PSAK No. 27 untuk tahun buku 2008 yang dapat dilihat pada tabel IV.1

Tabel IV.2

KOPERASI UNIT DESA KAMPAR NERACA

AKTIVA		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
	31-12-2008		31-12-2008
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Kas	235.542.739,92	Hutang Usaha	13.340.000,00

Piutang Usaha	6.240.000,00	Hutang Kendaraan	
Piutang Pinjaman Anggota	440.738.606,00	Hutang Titipan	187.913.415,31
Pinjaman Non Anggota	27.461.000,00	Hutang Lain-lain	233.293.000,00
Piutang Lain-lain	2.000.000,00	Biaya YMH Dibayar	17.760.100,00
Peyisihan Piutang Tak Tertagih	(5.697.296,06)	SHU Bagian Anggota	91.926.749,65
Persediaan	15.044.500,00	Hutang Dana-dana	26.891.101,97
Jumlah Aktiva Lancar	721.329.549,88	Jumlah Kewajiban Lancar	571.124.366,93
<u>AKTIBA TETAP</u>		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Tanah	11.500.000,00	Hutang BPD	50.000.000,00
Bangunan	52.812.000,00	Hutang Dinas Koperasi	50.000.000,00
Kendaraan	507.200.000,00	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	100.000.000,00
Peralatan Usaha	1.771.000,00	EKUITAS	
Peralatan Kantor	26.409.167,00	Simpanan Pokok	40.007.000,00
Akumulasi Penyusutan	(218.666.848,33)	Simpanan Wajib	39.675.490,00
Jumlah Aktiva Tetap	381.025.318,67	Donasi	38.000.000,00
<u>AKTIVA LAIN-LAIN</u>		Cadangan	101.189.921,45
Aktiva lain-lain	1.000.000,00	SHU Tahun berjalan	213.158.090,15
Ak. Amortisasi	(200.000,00)	Jumlah Ekuitas	432.030.501,60
Jumlah Aset Lain-lain	800.000,00		
<u>JUMLAH AKTIVA</u>	1.103.154.868,53	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.103.154.868,53

PER 31 DESEMBER 2008

Sumber: Data Olahan

B. Penilaian dan Penyajian Perhitungan Hasil Usaha

Untuk perhitungan hasil usaha memuat pos-pos pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode. Menurut PSAK, pendapatan dan beban disajikan sebagai berikut:

1. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota

2. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai penjualan.
3. Beban usaha dan beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Laporan hasil usaha menurut PSAK No. 27 dimulai oleh penyajian Partisipasi Anggota yang meliputi Partisipasi Anggota bruto dikurangi Beban Pokok sehingga diperoleh nilai Partisipasi Anggota Netto. Kemudian pendapatan dari Non Anggota dikurangi Harga Pokok sehingga diperoleh nilai Laba (Rugi) Kotor dengan Non Anggota. Dari Partisipasi Netto Anggota dan Laba (Rugi) Kotor dengan Non Anggota diperoleh Sisa hasil Usaha Kotor dikurangi Beban Koperasi kemudian diperoleh Sisa Hasil Usaha.

Perhitungan hasil Usaha pada KUD Kampar belum disajikan secara tepat, hal ini terlihat dari Laporan Sisa Hasil Usaha (terlampir) dimana pendapatan usaha tidak disajikan sebagaimana mestinya.

Pendapatan KUD Kampar berasal dari penjualan barang dagang yang meliputi:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Penjualan Pupuk | Rp 26.300.000,00 |
| 2. Penjualan Waserda | Rp 2.325.800,00 |

Disamping itu, koperasi juga memperoleh pendapatan jasa yang terdiri dari:

1. Jasa SP	Rp 144.260.000,00
2. Jasa ADM SP	Rp 3.600.000,00
3. Jasa ADM Petani	Rp 27.012.000,00
4. Fee KUD	Rp 98.888.390,00
5. Pendapatan ADM Masuk Anggota	Rp 80.000,00
6. Fee Penyaluran Honda	Rp 780.000,00
7. Pendapatan Dana Keamanan	Rp 40.459000,00
8. Jasa Pupuk	Rp 13.412.000,00
9. Fee Listrik	Rp 15.129.219,00
10. Pendapatan Angkutan Buah	Rp 387.815.352,00
11. Pendapatan Angkutan Lain-lain	Rp 16.144.300,00

Dari Laporan Sisa Hasil Usaha ternyata pendapatan usaha disajikan berdasarkan kegiatan usaha koperasi yaitu penjualan pupuk, penjualan waserda, dan pendapatan jasa dan bukan berdasarkan pendapatan dari anggota dan pendapatan dari non anggota. Hal ini menyebabkan sulitnya membuat perhitungan untuk menentukan besarnya partisipasi anggota dan partisipasi non anggota.

Dengan tidak disajikannya pendapatan dari anggota dan non anggota ini maka koperasi tidak dapat melihat seberapa besar partisipasi anggota dalam memajukan koperasi.

Penulis berpendapat bahwa KUD Kampar harus memisahkan transaksi penjualan kepada anggota dan non anggota dengan membuat pembukuan secara terpisah sehingga besarnya partisipasi anggota dalam memajukan koperasi dan kepentingan koperasi dalam melayani anggota dapat terlihat dengan jelas.

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang partisipasi anggota dan kepentingan koperasi dalam melayani anggota, berikut penulis sajikan laporan perhitungan sisa hasil usaha yang berpedoman pada PSAK N0. 27 untuk tahun 2008 pada tabel IV.3

Dalam hal pengakuan beban tidak terdapat masalah karena koperasi telah memisahkan antara beban usaha koperasi dan beban perkoperasian. Hal ini telah sesuai dengan format yang ada pada PSAK No. 27.

Tabel IV.3

KOPERASI UNIT DESA KAMPAR
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008

PARTISIPASI ANGGOTA		
Partisipasi Bruto anggota		747.580.261,00
Beban Pokok		
Partisipasi Netto Anggota		747.580.261,00
PENDAPATAN DARI NON ANGGOTA		
Penjualan		28.625.800,00
Harga Pokok		(25.944.500,00)
Laba Kotor dengan Non Anggota		2.681.300,00
		750.261.561,00

Sisa Hasil Usaha Kotor	
BEBAN OPERASI	<u>(206.525.791,06)</u>
Beban usaha	543.735.769,94
SHU Koperasi	<u>(297.301.750,67)</u>
Beban Administrasi dan Umum	246.434.019,27
SHU setelah Administrasi dan Umum	
Pendapatan dan Beban lain-lain	2.503.477,22
Pendapatan Lain-lain	<u>(35.779.406,34)</u>
Beban lain-lain	(33.275.929,12)
	213.158.090,12
SHU Sebelum Pajak	
Pajak Penghasilan	213.158.090,15
SHU Setelah Pajak	

Sumber : Data Olahan

C. Penilaian dan Penyajian Laporan Arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas dari investasi, dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setara kas serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut. Laporan arus kas ini dapat disajikan dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung, pemilihan metode penyajian laporan arus kas disesuaikan dengan kondisi kinerja keuangan perusahaan.

KUD Kampar telah membuat dan menyajikan laporan arus kas sebagai mana mestinya. Hal ini telah sesuai dengan format yang ada pada PSAK No. 27

Karena ada beban penyisihan piutang tak tertagih yang tidak dibuat oleh koperasi, maka akan mengurangi jumlah perhitungan sisa hasil usaha.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang arus kas, berikut penulis sajikan arus kas untuk tahun 2008 pada tabel IV.4

TABEL IV.4

**KOPERASI UNIT DESA KAMPAR
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2008**

		Rp
ARUS KAS BERASAL DARI KEGIATAN OPERASI:		
SHU Bersih		
213.158.090,15		
Penyesuaian:		
Beban Penyusutan	57.733.415,56	
Beban Amortisasi	200.000,00	
Beban penyisihan piutang tak tertagih	5.697.296,06	
Penurunan hutang Kendaraan	(79.474.600,00)	
Kenaikan Hutang Titipan	111.018.279,21	
Kenaikan Hutang lain-lain	183.293.000,00	
Kenaikan Biaya YMH Dibayar	6.300.100,00	
Kenaikan SHU Bagian Anggota	37.641.935,38	

Kenaikan Hutang Dana-dana	11.033.617,67					
Penurunan Piutang Usaha	13.359.670,00					
Penurunan Piutang Lain-lain	3.137.350,00					
Kenaikan Persediaan	(14.937.000,00)					
						<u>335.003.05</u>
<u>4,00</u>						
Kas bersih yang berasal dari kegiatan operasi						
548.161.154,15						
ARUS KAS BERASAL DARI KEGIATAN INVESTASI						
Penambahan Tanah						
Penambahan Bangunan	(6.507.000,00)					
Penambahan Kendaraan	(25.000.000,00)					
Penambahan Peralatan Kantor	(5.675.000,00)					
Kas bersih yang berasal dari kegiatan investasi						
<u>(37.182.000,00)</u>						
ARUS KAS BERASAL DARI KEGIATAN PENDANAAN						
Penurunan Hutang JK Panjang	(316.640.000,00)					
Kenaikan Simpanan Pokok	600.000,00					
Kenaikan Simpanan Wajib	11.206.490,00					
Cadangan	37.641.935,38					
Pencairan SHU Tahun lalu	(94.104.838,45)					
Kas bersih yang berasal dari kegiatan pendanaan						
<u>(361.296.413,07)</u>						
Kenaikan						Kas
149.682.741,08						
Kas	1			Januari		2008
85.859.998,84						
Kas	31			Desember		2008
235.542.739,92						

Sumber: Data Olahan

D. Penilaian dan Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Penyusunan laporan promosi ekonomi anggota memperlihatkan seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi satu tahun dengan mencatat selisih antara harga pelayanan atau penjualan oleh koperasi dengan harga pasar wajar untuk setiap unit kegiatan koperasi, yang mencakup empat unsur yaitu:

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang dan pengadaan jasa bersama

2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama
3. Manfaat dari simpan pinjam lewat koperasi
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan.

Jumlah dari masing-masing usaha tersebut ditambah dan dilaporkan untuk satu periode akuntansi. Dalam hal ini KUD Kampar belum menyajikan laporan promosi ekonomi anggota sebagai bagian dari laporan keuangan koperasi sehingga diketahui seberapa besar manfaat yang diterima oleh anggota dari setiap unit usaha yang dilaksanakan koperasi.

Menurut Penulis, berdasarkan PSAK No. 27 , laporan promosi ekonomi anggota harus disajikan pada laporan keuangan koperasi karena laporan keuangan koperasi anggota merupakan salah satu bagian laporan keuangan.

Harga pokok produksi untuk tahun 2008 sebesar Rp 25.944.500,00 keuntungan yang ditetapkan oleh koperasi sebesar 10 persen dari harga pokok penjualan yaitu sebesar Rp 2.594.450,00. Sedangkan dipasaran jika harga produksi sebesar Rp. 25.944.500,00 pasar mengambil keuntungan 12 persen atau sebesar Rp 3.113.340,00. Dari selisih harga inilah manfaat ekonomi dari transaksi pengadaan barang untuk anggota tahun 2008 sebesar Rp. 518.890,00

Untuk manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, penulis mengambil contoh perhitungan sebagai berikut: Pada tahun 2008, salah seorang anggota koperasi meminjam uang tunai di koperasi sebesar Rp 15.000.000,00

selama setahun, dengan suku bunga yang diberikan koperasi sebesar 24 persen selama setahun sehingga bunga yang harus dibayar anggota koperasi sebesar Rp. 3.600.000,00. Sedangkan jika anggota meminjam uang ke Bank sebesar Rp. 15.000.000,00 selama setahun, dan suku bunga yang diberikan Bank adalah 27 persen setahun maka anggota dibebani bunga sebesar Rp. 4.050.000,00. Maka selisih antara bunga koperasi dengan bunga bank sebesar Rp. 450.000,00 inilah yang menjadi beban penghematan pinjaman anggota.

Untuk kelebihan balas jasa simpan pinjam, penulis membuat contoh sebagai berikut: Pada tahun 2008, salah seorang anggota koperasi menyimpan uangnya di koperasi sebesar Rp 8.000.000,00 dengan bunga yang diberikan koperasi sebesar 3 persen, maka bunga yang diterima anggota koperasi sebesar Rp. 240.000,00. Sedangkan jika anggota menyimpan di bank sebesar Rp. 8.000.000,00 dengan bunga sebesar 2 persen, besarnya bunga yang diterima atas simpanan tersebut sebesar Rp.160.000,00. Jadi selisih antara suku bunga koperasi dengan bank adalah sebesar Rp. 80.000,00 inilah yang menjadi kelebihan balas jasa simpanan anggota untuk tahun 2008.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang laporan promosi ekonomi anggota yang berpedoman pada PSAK No. 27 untuk tahun 2008 pada tabel IV.5

Tabel IV.5
KOPERASI UNIT DESA KAMPAR
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008

PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN	
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA	
Pemasaran Produk Anggota atas Dasar Harga Koperasi	Rp. -
Pemasaran Produk Anggota atas Dasar Harga Pasar	(-)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota	Rp. -
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG DAGANG	
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Pasar	Rp. 3.113.340,00
Pengadaan barang atas Dasar Harga Koperasi	Rp. (2.594.450,00)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pengadaan Barang Dagangan	Rp. 518.890,00

MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI	
Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp 450.000,00
Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	<u>Rp (80.000,00)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan Jasa Untuk Anggota	Rp 370.000,00
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun berjalan	Rp. 888.890,00
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN	
Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan Untuk Anggota	<u>Rp. 218.855.386,21</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	Rp. 219.744.276,21

Sumber: Data Olahan

E. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan. Sesuai dengan fungsinya memberikan tambahan informasi mengenai pos-pos neraca dan perhitungan sisa hasil usaha. Catatan atas laporan keuangan dapat dibagikan menjadi dua bagian yaitu kebijakan akuntansi dan penjelasan unsur-unsur laporan keuangan.

Menurut PSAK No. 27 Tahun 2007, catatan atas laporan keuangan menyajikan kebijakan akuntansi antara lain:

1. Perlakuan akuntansi mengenai:
 - a. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota
 - b. Kebijakan akuntansi tentang asset tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya.
 - c. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.
2. Pengungkapan informasi lain antara lain:

- a. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun praktik, atau yang telah dicapai oleh koperasi
- b. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha manajemen yang diselenggarakan untuk anggota, dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.
- c. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
- d. Pengklasifikasian piutang dan utang yang timbul dari transaksi dari anggota dan non anggota.
- e. Pembatasan penggunaan dan resiko atas aset tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
- f. Asset yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
- g. Asset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
- h. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
- i. Hak dan tanggungan permodal modal penyertaan.
- j. Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

Dalam laporan keuangan KUD Kamar telah menyajikan catatan laporan keuangan (terlampir), namun demikian catatan atas laporan keuangan tersebut belum menyajikan sebagai mana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini karena catatan atas laporan keuangan tersebut hanya menyajikan kebijakan-kebijakan akuntansi, jenis-jenis pendapatan koperasi perbidang usaha dan biaya-biaya perbidang usaha, namun tidak menyajikan pendapatan usaha sesuai dengan transaksi dengan anggota dan non anggota.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab sebelumnya ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan laporan keuangan koperasi tidak menyajikan secara terpisah antara aktivitas anggota dan non anggota sehingga tujuan pelaporan keuangan koperasi tidak dapat terpenuhi. Untuk itu diperlukan sistem pencatatan dan dokumen yang baik dan lengkap.
2. Dalam laporan neraca, KUD Kampar tidak memisahkan antara piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non anggota, sehingga menyebabkan laporan keuangan tidak dapat memberikan informasi seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada anggota koperasi serta tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan keterkaitan antara anggota koperasi.
3. Penyajian piutang koperasi dalam neraca belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, penyajiannya tidak mencerminkan jumlah yang diharapkan dapat tertagih, karena koperasi tidak membuat suatu penyisihan piutang tak tertagih.

4. Dalam perhitungan sisa hasil usaha, koperasi tidak melakukan pemisahan antara pendapatan dari anggota dan pendapatan dari non anggota, karena tidak adanya pemisahan ini menyebabkan besarnya partisipasi anggota dalam memajukan koperasi dan kepentingan koperasi dalam melayani anggotanya tidak dapat terlihat dengan jelas.
5. Dari unsur-unsur laporan keuangan yang harus disajikan menurut PSAK No. 27 tahun 2007, KUD Kampar hanya menyajikan neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha, arus kas dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan promosi ekonomi anggota belum disajikan oleh koperasi.

B. SARAN

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan dalam kesimpulan, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. KUD Kampar sebaiknya melakukan pemisahan pencatatan antara transaksi yang berasal dari anggota dan non anggota, terutama antara pendapatan dari anggota dan non anggota, sehingga alokasi pendapatan dan beban dapat dihitung dari perbandingan manfaat yang diperoleh anggota.
2. Dalam penyajian neraca sebaiknya KUD Kampar memisahkan antara piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non anggota.

3. Sebaiknya KUD Kampar membuat taksiran piutang tak tertagih karena dalam prakteknya dapat saja terjadi adanya piutang yang tidak dapat ditagih, sehingga piutang menunjukkan nilai yang sebenarnya yang dapat direalisasikan.
4. Dalam penyusunan laporan keuangan KUD Kampar seharusnya menyusun dan menyajikan semua unsur-unsur laporan keuangan yaitu: neraca, perhitungan sisa hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan.
5. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang handal, sebaiknya koperasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pendidikan perkoperasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji, Djoko, Sudantoko, *Koperasi, Kewiraan, dan Usaha Kecil*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- .
Al Qur'an dan Terjemahan, CV Asy Syifa', Semarang.
- Fraser, Ly M dan Ailen Ormiston, *Memahami Laporan Keuangan*, Edisi ketujuh, Alih Bahasa Prio Dermawan, PT. Indeks, 2008
- Harahap, Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Raja Garafindo persada, Jakarta, 2006
- Hendrojogi, *Koperasi Azaz dan Praktek*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2007
- Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Kieso, Donald E, Jefri J Weygand, *Akuntansi Intermediate*, Edisi Ketujuh, Jilid 1, Alih Bahasa, Herman Wibowo, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 2002
- Kusnadi, H, *Akuntansi Keuangan*, Edisis Revisi Pertama, Universitas Brawijaya, Malang, 2002.
- Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi ke Empat, Liberty, Yokyakarta, 2004
- M. Ali Hasan, *Masail fiqhiyah*, Cetakan Keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003 .
- Pemerintahan RI, *Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian*, Lembaga Negara RI, Jakarta 1992.
- Sadeli, Lili, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Cetakan ke Tiga, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Sitio, Arifin dan Haloman Tamba, *Koperasi Teori Dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 2001.

Soemarso SR, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Buku Satu, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Subandi, *Ekonomi Akuntansi Teori dan Praktik*, Alfabet, Bandung, 2009

Suhrawardi, K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Tunggal, Amin Widjaja, *Akuntansi Perusahaan Kecil Dan Menengah*, Rineka cipta, Jakarta, 2002

Widiayanti, Ninik, *Manajemen Koperasi*, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

II.1	Contoh Laporan Neraca sesuai dengan PSAK No.27.....	38
II.2	Contoh Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha sesuai dengan PSAK No.27....	41
II.3	Contoh Laporan Arus Kas.....	43
II.4	Contoh Laporan Promosi Ekonomi Anggota.....	46
IV.1	Taksiran Piutang Tak Tertagih.....	58
IV.2	Laporan Neraca sesuai dengan PSAK No.27.....	62
IV.3	Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha sesuai dengan PSAK No.2.....	66
IV.4	Laporan Arus Kas sesuai dengan PSAK No.27.....	68
IV.5	Laporan Promosi Ekonomi Anggota sesuai dengan PSAK No. 27.....	72

DAFTAR GAMBAR

III.1 Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Kampar.....	52
--	----